

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013. Laporan ini merupakan bagian dari upaya Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan atas pelaksanaan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Direktur Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2013. Capaian kinerja yang disajikan berupa tingkat capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian dan sasaran strategis Program Pelestarian Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai evaluasi kinerja maupun informasi, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun yang akan datang.

Jakarta, Januari 2014
Sekretaris Ditjen Kebudayaan,

Nono Adya Supriyatno

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Direktorat Jenderal Kebudayaan	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2013.....	11
C. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2013	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013	15
A. Analisis Permasalahan Tahun 2012 dan Tindak Lanjut	15
B. Analisis Capaian Sasaran Tahun 2013	16
C. Akuntabilitas Keuangan	43
IV. PENUTUP	47
V. LAMPIRAN	49

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berisi laporan capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) selama tahun 2013 dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2010 – 2014 dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Rencana kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2013 adalah berisi program dan kegiatan yang harus diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan pelaksanaan Program Pelestarian Budaya, khususnya kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Realisasi capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

REALISASI KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN TAHUN 2013

NO	PROGRAM	SASARAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET DAN CAPAIAN		
					TARGET	CAPAIAN	
					2013	2013	%
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Program Pelestarian Budaya	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	1	Jumlah Layanan Bidang Hukum	7 Dokumen	6 Dokumen	86
			2	Jumlah Layanan Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Program	10 Dokumen	10 Dokumen	100
			3	Jumlah Layanan Bidang Keuangan	6 Dokumen	6 Dokumen	100
			4	Jumlah Layanan Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	100
			5	Jumlah Layanan Bidang Kerjasama Antar Instansi	4 Dokumen	4 Dokumen	100
			6	Jumlah Layanan Bidang Kehumasan	9 Dokumen	9 Dokumen	100
			7	Jumlah Penyuluh Budaya non PNS	150 Penyuluh	150 Penyuluh	100
			8	Jumlah Pelayanan Data Dan Statistik Kebudayaan	6 Laporan	6 Laporan	100

Berdasarkan tabel realisasi capaian kinerja tersebut dapat disampaikan bahwa kinerja utama Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2013 memiliki target sebanyak 8 kinerja Kegiatan, yaitu: Jumlah Layanan Bidang Hukum, Jumlah Layanan Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program, Jumlah Layanan Bidang Keuangan, Jumlah Layanan Kepegawaian, Jumlah Layanan Bidang Kerjasama antar Instansi, Jumlah Layanan Bidang Kehumasan, Jumlah Penyuluh Budaya Non PNS, Jumlah Pelayanan Data dan Statistik Kebudayaan..

Capaian kinerja kegiatan tersebut sebanyak 8 kinerja kegiatan dapat dicapai sesuai target yang ditentukan, dan 1 kinerja utama tidak dapat dicapai sepenuhnya. Kinerja utama yang belum dapat dicapai sepenuhnya yaitu: jumlah Layanan Bidang Hukum.

Target Kinerja Kegiatan, Jumlah Layanan Bidang Hukum sebanyak 7 Peraturan hanya tercapai sebanyak 6 Peraturan. Target jumlah layanan bidang hukum tidak dapat sepenuhnya tercapai karena penyusunan Permendikbud tentang Undang-undang Perfilman tidak dapat terselesaikan. Penyelesaian Permendikbud ini masih menunggu selesainya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film yang masih dalam pembahasan antar Kementerian.

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut di tahun mendatang adalah melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film dengan mengintensifkan pelaksanaan koordinasi antar Kementerian.

Akuntabilitas kinerja keuangan untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 178.226.518.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 136.205.842.928,- atau 76,42 %. Sedangkan alokasi anggaran untuk mencapai kinerja yang ditetapkan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sebesar Rp 105.373.503.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 74.978.416.270,- atau sekitar 71,15 %. Ketidakcapaian realisasi anggaran ini karena tidak terealisasinya 1 target kinerja kegiatan layanan bidang hukum dan terjadinya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian 7 kinerja kegiatan yang ditetapkan.

Realisasi anggaran tersebut jauh dari target yang direncanakan sebesar 100%. Kendala umum yang dihadapi adalah: belum terbangunnya sistem (infrastruktur dan metode kerja) yang berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan anggaran dan monitoring, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa belum berjalan maksimal, karena belum adanya Unit Layanan Pengadaan pada Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2013 belum sepenuhnya tercapai.